



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.72/ 30.8.566 /WK-PYK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2025.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:
- a. dinas pendidikan
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun

berkenaan;
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. penutup.

- KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 berpedoman pada :
a. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai triwulan ke II tahun berkenaan.
- KETUJUH : Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH NOMOR
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279
Payakumbuh

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN	I-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Bulan Juni Tahun 2025	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah...	II-23
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	III-5
BAB V PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2024 Kota Payakumbuh.....	II-3
Tabel 2.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	II-9
Tabel 2.3	:	Rekapitulasi Hasil SKM Kota Payakumbuh.....	II-15
Tabel 2.4	:	Nilai Capaian Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat.	II-22
Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	III-3
Tabel 3.2	:	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	: Nilai Evaluasi LPPD Kota Payakumbuh tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	II-11
Gambar 2. 2	: Perkembangan Nilai IKM Kota Payakumbuh.....	II-16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun anggaran 2025 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026. Selanjutnya, dengan telah dilantikannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif periode 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas dan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, pada tahun berjalan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu dilakukan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2025.

Perubahan ini antara lain disebabkan oleh hal-hal :

1. Perubahan komposisi anggaran pada Perangkat Daerah yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait prioritas nasional;
2. Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan dengan dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029
3. Perubahan target kinerja kegiatan menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada saat ini;
4. Evaluasi pelaksanaan anggaran selama 6 (enam) bulan yang telah dilalui, ada beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian baik target maupun rincian belanja dan ada penambahan kegiatan baru;
5. Pergeseran pagu anggaran antar Sub Kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
6. Penyesuaian rincian belanja tahun anggaran 2025 karena ada beberapa rekening sub kegiatan yang belum tepat;

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informai Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3)
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan selama tahun 2025. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh merupakan *guideline* dalam percepatan kegiatan serta pencapaian sasaran program. Disamping itu, perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah juga merupakan panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah untuk mengevaluasi serta menjaga arah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan potensi yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sampai dengan Bulan Juni 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah

BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sampai dengan Bulan Juni 2025

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh termasuk dalam unsur pendukung pemerintahan yaitu urusan pendukung Kesekretariatan Daerah. Dalam pelaksanaan urusan ini, Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh melaksanakan 3 program, 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.974.498.737,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan II sebesar Rp. 13.698.859.639,- atau 42,84 %.

Masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target anggaran dan kinerja adalah pembayaran premi asuransi kendaraan dinas masih berlaku sampai saat ini dan jatuh tempo pada bulan November tahun 2025 sehingga bisa direalisasikan pada Triwulan IV

2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target anggaran dan kinerja adalah masih dalam proses e-katalog dan direncanakan realisasi keuangan dan fisik pada Triwulan III.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target anggaran dan kinerja adalah masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog dan direncanakan akan pencairan keuangan pada bulan Juli 2025

4. Pengadaan Mebel

5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan ini belum terlaksana karena perlu penyesuaian dengan jadwal Kepala Daerah yang intensitas kegiatan sangat tinggi.

7. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
8. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target anggaran dan kinerja adalah belum ada sampai saat ini konfirmasi kesediaan kehadiran narasumber untuk pelaksanaan acara sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Terlepas dari kendala diatas, sub kegiatan yang bersifat rutin dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan seperti Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (44,55%); Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (44,37%); Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (44,44%); Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (47,11%), Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (36,48%), Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (41,07%); Penyediaan, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (40,79%), Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (30,51%), Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (47,12%)

Selain itu ada beberapa sub kegiatan yang telah terlaksana dan realisasi anggaran sudah lebih dari 50% diantaranya seperti pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (55,24%), Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (51,96%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor (52,58%), Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (53,38%), Fasilitas Kunjungan Tamu (85,23%), Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (61,22%), Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (87,58%), Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (93,75%), Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (64,32%), Pemeliharaan Mebel (51,56%), Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (98,83%), Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (63,59%), Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (55,53%), Fasilitas Keprotokolan (54,93%), Fasilitas Komunikasi Pimpinan (65,73%), Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (52,09%), Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (62,25%).

Untuk lebih jelasnya, rincian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 sampai kondisi triwulan II dapat dilihat pada tabel II.1 Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dibawah ini.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TRIWULAN : II

No.	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
					6			7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100			
					K	Rp	unit	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	Urusan Pendukung Sekretariat Daerah	4 01																					
	Sekretariat Daerah	4 01				87.538.702.681		37.683.824.526		31.974.498.737		5.626.038.068		8.072.821.571		13.698.859.639		51.382.684.165		59%			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				Nilai LPPD	3,200	Nilai	87.538.702.681	3,3922	37.683.824.526	3,1900	31.974.498.737		5.626.038.068		8.072.821.571		13.698.859.639		51.382.684.165	59%		
					Nilai IKM	88,80	Nilai		89,65		88,60												
A		4 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	88,80	Nilai	79.348.043.323	89,65	30.764.377.039	88,60	27.148.071.337		5.292.379.723		7.082.270.213		12.374.649.936	88,37	43.139.026.975	54%		
					Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	A	Nilai		BB		A							BB					
I		4 01 01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100	persen	363.200.000	100	178.473.766	100	99.394.050	25	25.133.283	25	27.975.603	50	53.108.886	100	231.582.652	100	64%	
					IKM Sekretariat Daerah	90	Nilai		89,91		89												
1		4 01 01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	153.100.000	4	64.342.271	4	16.812.300	2	4.830.611	1	2.659.440	3	7.490.051	7	71.832.322	47%	
2		4 01 01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	210.100.000	4	114.131.495	4	82.581.750	1	20.302.672	1	25.316.163	2	45.618.835	6	159.750.330	76%	
II		4 01 01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90	persen	39.003.615.648	50	14.146.161.431	90	11.194.119.696	15	2.286.466.101		2.680.265.013	15	4.966.731.114	90	19.112.892.545	90	49%
1		4 01 01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang/bulan	36.763.615.648	71	13.421.836.511	78	10.643.997.096	71	2.229.976.101		2.536.057.013	71	4.766.033.114	71	18.187.869.625	49%	
2		4 01 01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	laporan	2.240.000.000	12	724.324.920	12	550.122.600	3	56.490.000	3	144.208.000	6	200.698.000	18	925.022.920	41%	
III		4 01 01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	200.000.000	100	49.905.300	100	50.000.000		-		-		100	49.905.300		25%	
1		4 01 01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	200.000.000	1	49.905.300	1	50.000.000		-		-		1	49.905.300		25%	
IV		4 01 01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terbimbing administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	400.000	100	41.385.240	100	80.000.000		-		-			41.385.240			
1		4 01 01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	400.000	0	41.385.240	80	80.000.000		0		-			41.385.240			
V		4 01 01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100	persen	5.146.397.250	100	4.442.742.797	100	2.274.586.500	25	507.683.524	25	863.213.595	50	1.370.897.119	100	5.813.639.916	113%	
1		4 01 01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	113.378.760	12	65.675.630	9	34.985.000	2	1.977.620	3	16.200.000	5	18.177.620	2	83.853.250	74%	
2		4 01 01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	111.054.350	28	442.620.000	5	99.996.000				-			442.620.000			
3		4 01 01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	128.704.340	24	70.843.578	20	69.743.000	5	18.873.847	5	17.799.481	10	36.673.328	34	107.516.906	84%	
4		4 01 01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	242.859.800	1	91.521.973	12	57.822.350	3	16.276.633	3	14.587.530	6	30.864.163	7	122.386.136	50%	
5		4 01 01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	dokumen	400.000	3	447.196.810	3	424.123.150		-	3	99.441.960	3	99.441.960	6	546.638.770		
6		4 01 01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	1.800.000.000	1	1.639.986.466	12	889.697.000	3	242.867.570	3	515.405.390	6	758.272.960	7	2.398.259.426	133%	
7		4 01 01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	laporan	2.750.000.000	144	1.684.898.340	144	698.220.000	32	227.687.854	35	199.779.234	67	427.467.088	211	2.112.365.428	77%	
VI		4 01 01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	persen	171.600.000	90	509.053.500	90	3.482.451.313	25	837.681.300	25	1.266.600.000	50	2.104.281.300	90	2.613.334.800		
1		4 01 01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	200.000		-	2	1.600.000.000	1	657.100.000		-	1	657.100.000	1	657.100.000		

No.	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab			
					6			7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	unit	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100	16												
		4 01 01 2,07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	400.000	-	3	1.446.222.000	0	3	1.266.600.000	3	1.266.600.000	3	1.266.600.000								
		4 01 01 2,07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	400.000	-	6	199.835.675	0			-											
		4 01 01 2,07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	169.800.000	63	327.120.000	6	44.898.000	0			-		327.120.000								
		4 01 01 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	400.000	2	130.429.500	4	99.998.388	4	94.800.500	-	4	94.800.500	4	225.230.000							
		4 01 01 2,07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	400.000	3	51.504.000	4	91.497.250	4	85.780.800	-	4	85.780.800	4	137.284.800							
VII		4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	persen	12.859.191.797	90	3.984.639.494	90	3.228.481.810	25	505.016.932	680.469.877	1.185.486.809	90	5.170.126.303	40%							
1.		4 01 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	79.992.000	12	19.571.000	-		-		-			19.571.000	24%							
2.		4 01 01 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	3.659.540.000	12	1.359.215.303	12	941.039.294	3	203.548.981	3	211.785.636	6	415.334.617	18	1.774.549.920	48%					
3.		4 01 01 2,08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	640.991.588	1	529.223.026	12	391.787.800	1	84.251.775	5	167.749.125	6	252.000.900	7	781.223.926	122%					
4.		4 01 01 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	8.478.668.209	12	2.076.630.165	12	1.895.654.716	3	217.216.176	3	300.935.116	6	518.151.292	18	2.594.781.457	31%					
VIII		4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	persen	5.340.680.000	90	1.835.377.250	90	1.998.208.800	25	159.724.037	25	390.584.849	50	550.308.886	90	2.385.686.136	45%					
1.		4 01 01 2,09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	2.405.600.000	12	718.461.424	15	612.180.000	15	81.434.106	15	158.635.843	15	240.069.949	15	958.531.373	40%					
2.		4 01 01 2,09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	1.590.600.000	42	672.922.522	45	754.140.000	45	71.649.931	45	143.853.906	45	215.503.837	45	888.426.359	56%					
3.		4 01 01 2,09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	125.400.000	10	53.802.000	10	27.500.000		5	14.180.000	5	14.180.000	15	67.982.000	54%						
4.		4 01 01 2,09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	68.980.000	10	28.201.000	10	22.210.000	2	6.640.000		2.105.000	2	8.745.000	12	36.946.000	54%					
5.		4 01 01 2,09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	600.100.000	4	167.509.264	4	430.258.800		2	39.415.500	2	39.415.500	4	206.924.764	34%						
6.		4 01 01 2,09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100.000.000	4	34.018.280	4	25.000.000		2	9.961.000	2	9.961.000	4	43.979.280	44%						
7.		4 01 01 2,09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	450.000.000	4	160.462.760	4	126.920.000		2	22.433.600	2	22.433.600	4	182.896.360	41%						
IX		4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100	persen	2.568.360.168	100	856.540.681	100	1.590.553.868	20	144.537.340	25	232.845.341	45	377.382.681	100	1.233.923.362	48%					
1.		4 01 01 2,11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	729.879.228	1	69.871.081	2	845.117.768	1	12.431.740	2	49.349.341	2	61.781.081	1	131.652.162	18%					
2.		4 01 01 2,11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	paket	218.480.940	6	220.969.600	5	144.046.100	5	49.905.600	5	85.246.000	5	135.151.600	1	356.121.200	163%					
3.		4 01 01 2,11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	orang	20.000.000	-	8	10.000.000									0%						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)	PD Penanggung Jawab				
					6			7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	unit	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
4		4 01 01 2,11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	1.600.000.000	1	565.700.000	2	591.390.000	2	82.200.000	2	98.250.000	2	180.450.000	1	746.150.000	47%					
X		4 01 01 2,12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahainggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100	persen	2.476.598.380	100	881.928.927	85	1.313.546.700	25	187.558.840	25	582.892.130	50	770.450.970	85	1.652.379.897	67%					
1		4 01 01 2,12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	1.782.329.900	1	739.364.417	15	646.776.500	5	120.154.750	5	291.133.524	10	411.288.274	11	1.150.652.691	65%					
2		4 01 01 2,12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	400.200.000		534.695.000	15	534.695.000	5	66.004.090	5	230.926.910	10	296.931.000	10	296.931.000	74%					
3		4 01 01 2,12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	paket	294.068.480	8	142.564.510	15	132.075.200	2	1.400.000	7	60.831.696	9	62.231.696	17	204.796.206	70%					
XI		4 01 01 2,13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09	indeks	1.459.795.410	39,09	618.443.740	39,09	288.899.650		24.115.983		29.993.889		54.109.872	39,09	672.553.612	46%					
1		4 01 01 2,13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	dokumen	499.712.470	1	286.146.400	1	72.017.700		17.190.305		6.580.067		23.770.372	1	309.916.772	62%					
2		4 01 01 2,13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	laporan	540.100.000	1	204.474.977	1	177.779.200		3.018.312		16.676.355		19.694.667	1	224.169.644	42%					
		4 01 01 2,13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	dokumen	419.982.940	2	127.822.363	2	39.102.750		3.907.366		6.737.467		10.644.833	4	138.467.196	33%					
XII		4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolanan) yang difasilitasi dengan baik	100	persen	9.758.204.670	100	3.219.724.913	100	1.547.828.950	25	614.462.383	25	327.429.916	50	941.892.299	100	4.161.617.212	43%					
1		4 01 01 2,14 0001	Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	12	laporan	584.996.590	12	161.727.620	12	99.980.050	3	16.386.870	3	38.536.250	6	54.923.120	18	216.650.740	37%					
2		4 01 01 2,14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	8.172.708.080	12	2.606.213.183	12	1.123.381.900	3	553.424.513	3	184.976.996	6	738.401.509	18	3.344.614.692	41%					
3		4 01 01 2,14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	laporan	1.000.500.000	12	451.784.110	12	324.467.000	3	44.651.000	3	103.916.670	6	148.567.670	18	600.351.780	60%					
B		4 01 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,200	Nilai	6.184.959.448	3,3922	6.286.054.863	3,1900	4.483.520.900		324.270.190		892.588.606		1.216.858.796	3,3922	7.502.913.659	121%					
				Indeks Reformasi Hukum	75	indeks		87	-	74							-	87	-						
XIII		4 01 02 2,01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100	persen	2.240.300.000	100	1.652.265.232	100%	769.713.300	25	111.202.172	25	138.772.542	50	249.974.714	100	1.902.239.946	85%					
				Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100	persen	-	100	-	100		25		25		50	-	100	-						
1		4 01 02 2,01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	dokumen	840.100.000	1	690.866.617	1	331.930.000		14.345.040		33.726.804		48.071.844	1	738.938.461	88%					
2		4 01 02 2,01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	dokumen	540.100.000	1	351.941.433	1	53.035.750		-		1.471.638		1.471.638	1	353.413.071	65%					
3		4 01 02 2,01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	dokumen	860.100.000	1	609.457.182	5	384.747.550	2	96.857.132	3	103.574.100	5	200.431.232	6	809.888.414	94%					
XIV		4 01 02 2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	persen	2.035.787.660	100	4.023.893.136	100	3.188.368.450	25	172.020.518	25	625.002.819	50	797.023.337	100	4.820.916.473	237%					
1		4 01 02 2,02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	dokumen	680.100.000	1	907.506.169	1	700.158.250		500.000		7.687.139		8.187.139	1	915.693.308	135%					
2		4 01 02 2,02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dokumen	365.587.660	1	2.564.038.104	1	1.962.037.700		-		461.278.740		461.278.740	2	3.025.316.844	828%					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
					6			7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	unit	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		4 01 02 2,02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dokumen	990.100.000	1	552.348.863	2	526.172.500	171.520.518	2	156.036.940	2	327.557.458	2	879.906.321		89%		
XV		4 01 02 2,03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100	persen	1.577.671.788	100	448.004.015	100	512.539.750	25	39.105.000	25	127.721.245	50	166.826.245	100	614.830.260		39%	
				Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100	persen	-	100	-	100	-	25	-	25	-	50	-	90	-			
1		4 01 02 2,03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3	dokumen	300.099.460	6	94.071.830	3	92.755.000	1.240.000	1	6.589.930	1	7.829.930	7	101.901.760		34%		
2		4 01 02 2,03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	kasus	1.100.100.000	4	294.254.360	2	411.806.750	37.865.000	1	120.153.960	1	158.018.960	5	452.273.320		41%		
3		4 01 02 2,03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3	dokumen	177.472.328	3	59.677.825	3	7.978.000	-	-	977.355	-	977.355	3	60.655.180		34%		
XVI		4 01 02 2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5	MoU/PKS	331.200.000	5	161.892.480	5	12.899.400	1.942.500	-	1.092.000	-	3.034.500	5	164.926.980		50%		
1		4 01 02 2,04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	dokumen	310.100.000	1	155.249.480	1	9.946.000	1.942.500	-	1.092.000	-	3.034.500	1	158.283.980		51%		
2		4 01 02 2,04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	laporan	21.100.000	1	6.643.000	1	2.953.400	0	-	-	-	1	6.643.000		31%			
C		4 01 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	78		2.005.699.910	91,58	633.392.624	77	342.906.500	9.388.155	-	97.962.752	-	107.350.907	91,58	740.743.531		37%		
XVII		4 01 03 2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100	persen	450.200.000	100	204.209.905	100	97.032.150	25	9.388.155	25	17.068.423	50	26.456.578	100	230.666.483		51%	
1		4 01 03 2,01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	dokumen	210.100.000	1	90.410.496	1	32.499.000	2.579.850	-	8.963.776	-	11.543.626	1	101.954.122		49%		
2		4 01 03 2,01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	laporan	240.100.000	1	113.799.409	1	64.533.150	6.808.305	-	8.104.647	-	14.912.952	1	128.712.361		54%		
XVIII		4 01 03 2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100	persen	120.100.000	100	60.586.204	100	18.603.350	-	-	1.011.654	-	1.011.654	100	61.597.858		51%		
1		4 01 03 2,02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	laporan	120.100.000	12	60.586.204	12	18.603.350	6	1.011.654	6	1.011.654	18	61.597.858		51%			
XIX		4 01 03 2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100	persen	1.405.300.000	100	357.108.481	100	216.667.900	-	25	77.896.081	25	77.896.081	100	435.004.562		31%		
				Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4	kali	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	5	-				
1		4 01 03 2,03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen	660.100.000	1	30.481.631	1	26.245.900	-	-	6.137.131	-	6.137.131	1	36.618.762		6%		
2		4 01 03 2,03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	dokumen	485.100.000	1	207.599.850	1	150.888.000	-	-	71.758.950	-	71.758.950	-	279.358.800		58%		
3		4 01 03 2,03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	orang	260.100.000	40	119.027.000	40	39.534.000	-	-	-	-	-	80	119.027.000		46%		
XX		4 01 03 2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1	dokumen	30.099.910	1	11.488.034	1	10.603.100	-	-	1.986.594	-	1.986.594	1	13.474.628		45%		

No.	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab			
									6			7		8		9		10			13 = 9 + 10 + 11 + 12			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
									K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
unit	satuan		unit		unit		unit		unit		unit		unit		unit		unit											
1		4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	dokumen	30.099.910	1	11.488.034	1	10.603.100	-			1.986.594			1.986.594	1	13.474.628		45%		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024			Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian thdp Renstra (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Nilai LPPD	3,3922	3,1800	3,3922*	106,67*	Sangat Baik	3,2000	106,01
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52	88,50	88,37	99,85	Sangat Baik	88,80	99,52
3	Indeks Pelayanan Publik	4,41	4,24	4,50	106,13	Sangat Baik	4,30	104,65
4	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	A	BB	90,49	Sangat Baik	A	90,49

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator:
 - a. Nilai LPPD dengan capaian kinerja 106,67%.
 - b. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 106,13%.
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada indikator :
 - a. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target nilai A realisasi dengan nilai B capaian sebesar 90,49% dengan kategori Sangat Baik.

b. Indeks Kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja 99,85%.

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Sasaran

Secara umum pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah tercapai pada Tahun 2024 dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Keberadaan organisasi pemerintah tetap masih dibutuhkan masyarakat, karena organisasi pemerintah bertujuan melayani kepentingan publik yang menyangkut eksternal yang tidak disediakan oleh organisasi swasta. Oleh karena itu organisasi pemerintah dituntut untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien serta adanya pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut yang pertama perlu diperhatikan dalam suatu organisasi pemerintah adalah struktur kelembagaan yang lebih baik, sumber daya yang berkompeten sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkualitas. Maka dari itu ditetapkan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Nilai LPPD

Sesuai ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada

pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2023, Kota Payakumbuh pada tanggal 30 Maret 2024 adalah Tepat waktu.

Namun hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 belum dapat disajikan sampai dokumen ini ditetapkan karena masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023.

Terlepas dari hal diatas, jika dilihat trend nilai LPPD Kota Payakumbuh 2 (dua) tahun sebelumnya terjadi peningkatan secara signifikan sesuai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meraih skor 3,3922 atau dengan status **“sedang”**. Dengan skor tersebut, Kota Payakumbuh menjadi yang terbaik diantara pemerintah Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan berada di peringkat 20 antar pemerintah Kota secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.7.6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

Dengan demikian capaian kinerja terhadap nilai LPPD Kota Payakumbuh sebesar 106,67% dimana pada Perjanjian Kinerja yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 3,1800 dan terealisasi sebesar 3,3922 dengan capaian kinerja **“Sangat Baik”**.

Gambar 3.2

Nilai Evaluasi LPPD Kota Payakumbuh tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022

	SALINAN																																																																																																																																				
 <p style="text-align: center;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.7.6646 TAHUN 2023 TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 MENTERI DALAM NEGERI,</p> <p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>	<p>3. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 93 (SEMILAN PULUH TIGA) KOTA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemerintahan Daerah</th> <th>Skor</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kota Surabaya</td><td>3,5866</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kota Surakarta</td><td>3,5718</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kota Makassar</td><td>3,5660</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kota Tangerang</td><td>3,5320</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kota Semarang</td><td>3,5254</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kota Medan</td><td>3,5095</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kota Palembang</td><td>3,4541</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kota Samarinda</td><td>3,4465</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kota Metro</td><td>3,4439</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kota Denpasar</td><td>3,4439</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kota Batam</td><td>3,4344</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>12</td><td>Kota Tangerang Selatan</td><td>3,4311</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kota Serang</td><td>3,4302</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>14</td><td>Kota Bogor</td><td>3,4250</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>15</td><td>Kota Blitar</td><td>3,4243</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>16</td><td>Kota Batu</td><td>3,4226</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>17</td><td>Kota Probolinggo</td><td>3,4220</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>18</td><td>Kota Yogyakarta</td><td>3,4215</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>19</td><td>Kota Pontianak</td><td>3,4187</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>20</td><td>Kota Payakumbuh</td><td>3,3922</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>21</td><td>Kota Bontang</td><td>3,3790</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>22</td><td>Kota Bandung</td><td>3,3362</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>23</td><td>Kota Tebing Tinggi</td><td>3,3358</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>24</td><td>Kota Tasikmalaya</td><td>3,3348</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>25</td><td>Kota Banjar</td><td>3,2985</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>26</td><td>Kota Pariaman</td><td>3,2982</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>27</td><td>Kota Yogyakarta</td><td>3,2920</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>28</td><td>Kota Salatiga</td><td>3,2915</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kota Padang Panjang</td><td>3,2836</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>30</td><td>Kota Cimahi</td><td>3,2693</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>31</td><td>Kota Padang</td><td>3,2587</td><td>Sedang</td></tr> <tr><td>32</td><td>Kota Gorontalo</td><td>3,2533</td><td>Sedang</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status	1	Kota Surabaya	3,5866	Tinggi	2	Kota Surakarta	3,5718	Tinggi	3	Kota Makassar	3,5660	Tinggi	4	Kota Tangerang	3,5320	Tinggi	5	Kota Semarang	3,5254	Tinggi	6	Kota Medan	3,5095	Tinggi	7	Kota Palembang	3,4541	Tinggi	8	Kota Samarinda	3,4465	Tinggi	9	Kota Metro	3,4439	Tinggi	10	Kota Denpasar	3,4439	Tinggi	11	Kota Batam	3,4344	Tinggi	12	Kota Tangerang Selatan	3,4311	Tinggi	13	Kota Serang	3,4302	Tinggi	14	Kota Bogor	3,4250	Tinggi	15	Kota Blitar	3,4243	Tinggi	16	Kota Batu	3,4226	Tinggi	17	Kota Probolinggo	3,4220	Tinggi	18	Kota Yogyakarta	3,4215	Tinggi	19	Kota Pontianak	3,4187	Tinggi	20	Kota Payakumbuh	3,3922	Sedang	21	Kota Bontang	3,3790	Sedang	22	Kota Bandung	3,3362	Sedang	23	Kota Tebing Tinggi	3,3358	Sedang	24	Kota Tasikmalaya	3,3348	Sedang	25	Kota Banjar	3,2985	Sedang	26	Kota Pariaman	3,2982	Sedang	27	Kota Yogyakarta	3,2920	Sedang	28	Kota Salatiga	3,2915	Sedang	29	Kota Padang Panjang	3,2836	Sedang	30	Kota Cimahi	3,2693	Sedang	31	Kota Padang	3,2587	Sedang	32	Kota Gorontalo	3,2533	Sedang
No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status																																																																																																																																		
1	Kota Surabaya	3,5866	Tinggi																																																																																																																																		
2	Kota Surakarta	3,5718	Tinggi																																																																																																																																		
3	Kota Makassar	3,5660	Tinggi																																																																																																																																		
4	Kota Tangerang	3,5320	Tinggi																																																																																																																																		
5	Kota Semarang	3,5254	Tinggi																																																																																																																																		
6	Kota Medan	3,5095	Tinggi																																																																																																																																		
7	Kota Palembang	3,4541	Tinggi																																																																																																																																		
8	Kota Samarinda	3,4465	Tinggi																																																																																																																																		
9	Kota Metro	3,4439	Tinggi																																																																																																																																		
10	Kota Denpasar	3,4439	Tinggi																																																																																																																																		
11	Kota Batam	3,4344	Tinggi																																																																																																																																		
12	Kota Tangerang Selatan	3,4311	Tinggi																																																																																																																																		
13	Kota Serang	3,4302	Tinggi																																																																																																																																		
14	Kota Bogor	3,4250	Tinggi																																																																																																																																		
15	Kota Blitar	3,4243	Tinggi																																																																																																																																		
16	Kota Batu	3,4226	Tinggi																																																																																																																																		
17	Kota Probolinggo	3,4220	Tinggi																																																																																																																																		
18	Kota Yogyakarta	3,4215	Tinggi																																																																																																																																		
19	Kota Pontianak	3,4187	Tinggi																																																																																																																																		
20	Kota Payakumbuh	3,3922	Sedang																																																																																																																																		
21	Kota Bontang	3,3790	Sedang																																																																																																																																		
22	Kota Bandung	3,3362	Sedang																																																																																																																																		
23	Kota Tebing Tinggi	3,3358	Sedang																																																																																																																																		
24	Kota Tasikmalaya	3,3348	Sedang																																																																																																																																		
25	Kota Banjar	3,2985	Sedang																																																																																																																																		
26	Kota Pariaman	3,2982	Sedang																																																																																																																																		
27	Kota Yogyakarta	3,2920	Sedang																																																																																																																																		
28	Kota Salatiga	3,2915	Sedang																																																																																																																																		
29	Kota Padang Panjang	3,2836	Sedang																																																																																																																																		
30	Kota Cimahi	3,2693	Sedang																																																																																																																																		
31	Kota Padang	3,2587	Sedang																																																																																																																																		
32	Kota Gorontalo	3,2533	Sedang																																																																																																																																		

Dibandingkan dengan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021, dimana Pemerintah Kota Payakumbuh mendapat Nilai LPPD sebesar 2,66 maka dapat disimpulkan bahwa pada penilaian tahun 2023 atas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 menjadi 3,3922 atau naik sebesar 78,42% dan melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 3,1700.

Faktor pendorong pencapaian target sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan serta perangkat daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini dengan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara optimal dan terukur.
- b. Melakukan pembekalan kepada Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dinilai sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dokumen yang perlukan dan diserahkan tepat waktu.
- c. Melakukan evaluasi mandiri secara intens antara tim penyusunan dengan perangkat daerah sebelum evaluasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Rencana Aksi yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi dan memperbaiki kualitas dokumen yang disyaratkan dalam evaluasi LPPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya pemenuhan semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan untuk evaluasi LPPD Kota Payakumbuh dengan cara melakukan asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Mengikutsertakan Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) penilaian LPPD dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menindaklanjuti Peraturan Walikota tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mengeluarkan surat permintaan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja pelayanan publik seperti PDAM Tirta Sago, Rumah Sakit Adnaan WD Kota Payakumbuh serta seluruh puskesmas di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan SKM dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi penyelenggara pelayanan maupun oleh pihak lain, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala”. Dalam penjelasan Undang-Undang Pelayanan Publik disampaikan juga bahwa penilaian kinerja

merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/ atau pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Pelaksanaan SKM secara mandiri dilaksanakan secara berkala per semester oleh seluruh perangkat daerah dan unit kerja pelayanan publik yang terdiri dari 31 perangkat daerah, 5 kecamatan, 1 RSUD, dan 1 Perumda Air Minum Tirta Sago. Hasil SKM mandiri ini akan dikompilasikan oleh Bagian Organisasi dan menghasilkan nilai IKM Kota Payakumbuh. Target Nilai IKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026.

Pelaksanaan SKM Semester I dilakukan secara manual sedangkan untuk SKM Semester II Tahun 2024 dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi SKM milik Kementerian PANRB, dimana Kota Payakumbuh merupakan salah satu lokus yang ditunjuk sebagai Instansi Implementasi Aplikasi SKM tersebut. Hasil kompilasi SKM Kota Payakumbuh Semester I yaitu 89,84 dan Semester II menunjukkan nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 86,90 dengan rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebesar 88,37 dengan predikat A.

Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 88,37. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target IKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 yaitu 88,50 dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Capaian Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 lebih rendah dari yang ditargetkan hanya 88,50 sehingga capaian nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 99,85%. Hasil ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 1,15 poin dimana pada tahun 2023 rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh 89,52. Penurunan nilai IKM pada tahun 2024 disebabkan oleh metode pelaksanaan SKM yang berubah dari manual menjadi online pada SKM Semester II 2024. Disamping itu, pada pelaksanaan SKM Semester II 2024 hanya dilaksanakan pada 1 jenis layanan pada masing-masing UPP dan periode pelaksanaan hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Meskipun demikian, hasil pelaksanaan SKM online pada semester II 2024 dinilai lebih berintegritas dan akurat karena pengisian kuesioner oleh responden langsung

terhubung ke aplikasi sehingga lebih meminimalisir kesalahan atau manipulasi data hasil SKM.

Nilai IKM Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, namun secara umum masih dalam kategori **Sangat Baik**. Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2020 hingga tahun 2024 yang dilakukan melalui survei mandiri dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3.3
Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2020 s/d 2024



Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	89.59	89.00	89.29	A
2	Sekretariat DPRD	85.45	98.44	91.94	A
3	Inspektorat	92.14	85.73	88.93	A

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
4	Dinas Pendidikan	92.24	83.78	88.01	B
5	Dinas Kesehatan	90.77	78.89	84.83	B
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	92.66	83.15	87.90	B
7	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	86.84	96.93	91.89	A
8	Satuan Pol PP & Pemadam Kebakaran	90.55	93.12	91.83	A
9	Dinas Sosial	90.13	99.50	94.82	A
10	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	98.72	77.78	88.25	B
11	DP3AP2KB	91.48	78.69	85.08	B
12	Dinas Ketahanan Pangan	86.45	84.71	85.58	B
13	Dinas Lingkungan Hidup	91.71	95.83	93.77	A
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	96.21	94.02	95.11	A
15	Dinas Perhubungan	90.52	90.66	90.59	A
16	Dinas Komunikasi & Informatika	92.02	86.30	89.16	A
17	Dinas Koperasi & UKM	86.49	84.44	85.47	B
18	DPMPSTP	97.77	93.57	95.67	A
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	87.16	81.53	84.35	B
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	87.45	86.17	86.81	B
21	Dinas Pertanian	89.05	87.44	88.24	B

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
22	Bappeda	89.96	89.70	89.83	A
23	Badan Keuangan Daerah	88.15	84.14	86.14	B
24	BKPSDM	88.31	91.11	89.71	A
25	Kecamatan Payakumbuh Barat	92.54	85.92	89.23	A
26	Kecamatan Payakumbuh Utara	91.21	88.22	89.72	A
27	Kecamatan Payakumbuh Timur	91.93	89.17	90.55	A
28	Kecamatan Payakumbuh Selatan	91.62	82.22	86.92	B
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	91.68	90.69	91.19	A
30	BPBD	92.13	80.06	86.10	B
31	Kesbangpol	90.08	92.69	91.39	A
32	RSUD dr. Adnaan WD	92.74	81.11	86.93	B
33	Puskesmas Ibh	94.73	84.42	89.57	A
34	Puskesmas Tarok	79.99	82.00	80.99	B
35	Puskesmas Parit Rantang	80.57	88.06	84.31	B
36	Puskesmas Lampasi	85.96	82.67	84.31	B
37	Puskesmas Tiakar	88.94	80.92	84.93	B
38	Puskesmas Air Tabit	92.85	85.97	89.41	A
39	Puskesmas Payolansek	83.24	78.56	80.90	B
40	Puskesmas Padang Karambia	88.33	89.39	88.86	A
41	PDAM Tirta Sago	82.96	86.12	84.54	B

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
	Rata-rata Nilai SKM Kota Payakumbuh	89.84	86.90	88.37	A

Pengukuran IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 selain pelaksanaan secara mandiri juga dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kota Payakumbuh Tahun 2024 bekerjasama dengan LPPM Universitas Andalas untuk melaksanakan SKM pada 19 (sembilan belas) unit kerja yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4) Dinas Penanaman Modal & PTSP
- 5) Dinas Sosial
- 6) RSUD dr. Adnaan WD
- 7) Puskesmas Padang Karambia
- 8) Puskesmas Ibhuh
- 9) Puskesmas Parit Rantang
- 10) Puskesmas Payolansek
- 11) Puskesmas Tarok
- 12) Puskesmas Lampasi
- 13) Puskesmas Air Tabit
- 14) Puskesmas Tiakar
- 15) Kecamatan Payakumbuh Timur & Kelurahan
- 16) Kecamatan Payakumbuh Utara & Kelurahan
- 17) Kecamatan Payakumbuh Selatan & Kelurahan
- 18) Kecamatan Payakumbuh Barat & Kelurahan
- 19) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori & Kelurahan

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan seluruh *stakeholder* penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Payakumbuh.
2. Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Payakumbuh juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan yang dapat mendongkrak nilai IKM Kota Payakumbuh.

Rencana Aksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reviu kembali beberapa unsur layanan yang ada pada setiap UKPP yang masih menjadi keluhan masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pemberi layanan sehingga kualitas layanan menjadi optimal dan berkualitas;
3. Evaluasi dan monitoring secara berkala.

3. Indeks Pelayanan Publik

Disamping penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik juga dinilai dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB. Hasil dari evaluasi ini adalah Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Dalam mengukur kualitas pelaksanaan pelayanan publik yang prima, disamping menggunakan survei kepuasan masyarakat, juga dinilai dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB. Hasil dari evaluasi ini adalah Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan aspek:

1. Kebijakan pelayanan yang terdiri dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat.
2. Profesionalisme SDM.
3. Sarana Prasarana yang terdiri dari ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, sarpras berkebutuhan khusus.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terdiri dari ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data.
5. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan.
6. Inovasi pelayanan.

Penentuan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri terhadap 3 (tiga) lokus baru terkait layanan barang, layanan jasa dan layanan administrasi. Unit kerja yang dijadikan lokus PEKPPP Mandiri adalah Dinas Sosial untuk layanan barang, RSUD untuk lokus layanan jasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lokus administrasi. Lokus evaluasi layanan barang ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan jasa untuk mengukur kualitas pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu dan layanan administrasi untuk mengukur penyelenggaraan layanan publik yang dekat dengan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 merupakan nilai hasil PEKPPP yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB.

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebesar 4,50 dengan predikat A-, kategori Sangat Baik dengan 2 lokus telah memperoleh predikat Pelayanan Prima yaitu Dinas Sosial dengan nilai 4,51 (Predikat A) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh dengan nilai 4,51 (Predikat A), untuk RSUD dr. Adnaan WD memperoleh nilai 4,48 dengan prediket A- kategori Sangat Baik.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh mulai dari pimpinan hingga unit kerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan pelayanan prima;
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik yang representatif sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh;
3. Kesadaran unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik.;
4. Kerjasama semua *stakeholder* terkait baik dari segi kebijakan maupun dalam hal penyelenggaraan pelayanan public.

4. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari indikator hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah oleh Inspektorat. Indikator hasil penilaian AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Sedangkan Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja;
2. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja;
3. Evaluasi terhadap pelaporan kinerja;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Capaian kinerja indikator hasil penilaian AKIP Sekdako oleh Inspektorat adalah BB dengan nilai 72,40 dari target A yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase

capaian kinerjanya 90,49%. Nilai hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nilai Capaian Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Tahun 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	17,50
	Jumlah	100	69,70	72,40
	Nilai		B	BB

Pada tahun 2024 Nilai AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat berdasarkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah 72,40 dengan prediket **Sangat Baik (BB)**, terjadi peningkatan yang signifikan tadi tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 nilai AKIP Sekretariat Daerah sebesar 69,70.

Rencana Aksi untuk terus meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang akan mempengaruhi penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reviu Renstra Sekretariat Daerah dengan mencermati kembali tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang selaras dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
2. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang lebih menegaskan bahwa terdapatnya hubungan kinerja strategis, kebijakan, aktivitas antar bagian yang saling berkaitan (*Crosscutting*)

3. Mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja di website unit kerja/ pemerintah daerah.
4. Peningkatan kualitas dokumen, evaluasi indikator kinerja individu dan keselarasan dengan sasaran OPD
5. Evaluasi internal secara berkala.
6. Perlu pemahaman atas penilaian AKIP OPD sesuai PermenPAN RB nomor 88 tahun 2021.

Disamping analisa dan penjelasan 4 (empat) indikator sasaran diatas untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas juga didukung oleh beberapa Program Kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas pemahaman aparaturn pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan terutama dengan perubahan-perubahan aturan dan kebijakan tentang Kecamatan dan Kelurahan;
2. Belum optimalnya inventarisasi data rupa bumi di Kota Payakumbuh;

3. Masih adanya kasus-kasus yang terkait dengan Pemerintahan yang perlu dilakukan advokasi;
4. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan struktur perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, hingga evaluasi kinerja yang dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi diantara unsur pemerintah daerah dan belum terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan, keuangan dan pelaporan

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari adanya arah kebijakan nasional Prioritas Nasional yang termuat dalam Astacita yakni: a) Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan; b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; d) Pengendalian inflasi di daerah; e) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; f) Dukungan swasembada pangan; dan g) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kemudian dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Disamping itu, pada bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Maka dari itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kebijakan, prioritas dan komposisi anggaran yang sudah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan target kinerja dan anggaran pada dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan.

Adapun perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

1. Perubahan struktur belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja.
2. Optimalisasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai arahan dari Pemerintah Pusat untuk lebih meningkatkan keterbukaan dalam penyebarluasan informasi pelayanan publik dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.

3. Penguatan kelembagaan dengan merancang SOTK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
4. Penguatan terhadap koordinasi antar perangkat daerah dalam penurunan angka inflasi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dimana tujuan dan sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah sudah tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk periode tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	83,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
	1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai LPPD	3,3922	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000
		2 Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,37	88,60	88,80	88,85	88,90	89,00	89,50
		4 Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58
		5 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	72,40	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40
		6 Indeks Kematangan Organisasi	39,09	39,09	40,03	40,05	40,07	40,09	41,01
		7 Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	97,60	97,65	97,68	97,70	97,73	97,75	97,75
		8 Indek Reformasi Hukum	87	87	87	87	87	87	87

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		9 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	89,24	89,30	89,40	89,50	89,60	89,70	89,80
		10 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	17,31	17,35	17,40	17,45	17,50	17,55	17,60
		11 Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	100	100	100	100	100
		12 Indeks BerAKHLAK	72,94	73	73,50	74	74,50	75	75,50

3.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah tahun 2025 dengan jumlah anggaran RKPD Rp.31.708.482.737,-, APBD anggaran tahun 2025 sebesar 32.949.194.011,- dan Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar 32.891.498.737,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 1.183.016.000,-. Pagu anggaran tersebut mendukung 3 program, 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Perubahan Rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 tertuang dalam program kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 82.581.750,- dan APBD 2025 sebesar Rp.82.581.750,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.108.947.400,- atau bertambah sebesar Rp.26.365.650,-, untuk penambahan belanja belanja penggandaan dan belanja lembur
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 10.607.197.096,- dan APBD 2025 sebesar Rp.10.643.997.096,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.10.431.507.096,- atau berkurang sebesar Rp.175.690.000,-, penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dalam Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 550.122.600,- dan APBD 2025 sebesar Rp.550.122.600,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 766.722.600,- atau bertambah sebesar Rp.216.600.000,-, untuk penambahan belanja honorarium pengelola keuangan sesuai Perwako No. 5 Tahun 2025.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp

71.000.000,- dan menjadi Rp.80.000.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.80.000.000,- atau bertambah sebesar Rp.9.000.000,-, penambahan anggaran karena penyesuaian dengan jumlah pegawai pada tahun anggaran berjalan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 34.985.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp. 34.985.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 66.015.000,- atau bertambah sebesar Rp.31.030.000,-, untuk penambahan belanja instalasi listrik,

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 69.743.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp.69.743.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.77.254.000,- atau bertambah sebesar Rp.7.511.000,-, untuk penambahan belanja alat tulis kantor

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 39.448.050,- dan menjadi Rp.59.476.350,- karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.62.297.350,- atau bertambah sebesar Rp.22.849.300,-, untuk penambahan belanja cetak foto Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

e. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.31.837.500, dari RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.424.123.150,- menjadi Rp.392.285.650,- yang dipergunakan untuk kebutuhan kegiatan lainnya.

- f. Fasilitas Kujungan Tamu
Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 889.697.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp. 889.697.000,-. Pada RKPD perubahan 2025 menjadi Rp. 1.425.416.000,- bertambah sebesar Rp. 536.719.000,- karena adanya penambahan pada belanja makan minum tamu dan persiapan pelaksanaan HUT Kota.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 1.239.548.000,- dan menjadi Rp.1.396.423.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.698.220.000,- sehingga berkurang sebesar Rp.541.328.000,- karena adanya pengurangan rincian belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 1.350.000.000,- dan menjadi Rp.1.446.222.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.1.446.222.000,- bertambah sebesar Rp.96.222.000, karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2023
- b. Sub kegiatan pengadaan mebel anggaran RKPD 2025 sebesar Rp.199.835.675,- dan APBD 2025 sebesar Rp. 199.835.675,- . Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 188.849.950,- atau berkurang sebesar Rp.10.985.725,- disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran
- c. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp. 44.898.000,-, dan APBD 2025 sebesar Rp. 44.898.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.

89.898.000,- atau bertambah sebesar Rp.45.000.000,- untuk pembelian lighting studio podcast

- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 99.989.900,- dan APBD 2025 sebesar Rp.99.989.900,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.91.497.250,- berkurang sebesar Rp.8.492.650, karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pada Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp.27.130.960,- dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.941.039.294,- menjadi Rp.913.908.334,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil proyeksi pembayaran beberapa bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 391.790.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp.391.790.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 520.035.250,- atau bertambah sebesar Rp.128.245.250,- disebabkan karena adanya penambahan belanja sewa kursi dan tamanan hias.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 1.632.956.720,- dan APBD 2025 sebesar Rp.1.632.956.720,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 1.927.998.556,- sehingga bertambah anggaran sebesar Rp.295.041.836,-, disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran dengan metode outsourcing.
7. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp. 612.180.000,- dan menjadi Rp. 612.180.000,- pada APBD 2025.

Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 601.400.000,- sehingga anggaran berkurang sebesar Rp.10.780.000,- karena adanya penyesuaian anggaran sesuai Perpres 33 Tahun 2023.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp. 754.140.000,- dan menjadi Rp. 754.140.000,- pada APBD 2025. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 590.750.000,- sehingga anggaran berkurang sebesar Rp.10.780.000,- karena adanya penyesuaian anggaran dengan Perpres 33 Tahun 2023.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan mebel anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 9.977.500,- dan menjadi Rp.9.750.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.27.500.000,- sehingga anggaran bertambah sebesar Rp.17.522.500,- untuk penambahan volume pemeliharaan mebel sesuai kebutuhan

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 12.210.000,- dan menjadi Rp.22.210.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.29.660.000,- sehingga anggaran bertambah sebesar Rp.17.450.000,- untuk penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat-alat studio dan kamera

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 233.721.600,- dan APBD 2025 sebesar Rp.233.721.600,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp. 535.317.192,- atau

bertambah sebesar Rp.301.595.592,- karena masih terdapat kekurangan Kebutuhan untuk perbaikan kantor dan rumah dinas

- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 92.720.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp.92.720.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.126.920.000,- atau bertambah sebesar Rp.34.200.000,- karena adanya penambahan untuk perbaikan barang elektronik rumah tangga.

8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 984.905.144,- dan menjadi Rp.845.117.768,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.845.227.471,- atau berkurang sebesar Rp.139.677.673,- karena adanya penyesuaian anggaran dengan target insentif pajak dan retribusi

- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 66.119.520,- dan APBD 2025 sebesar Rp.66.119.520,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.144.046.100,- atau bertambah sebesar Rp.77.926.580,- karena adanya penambahan volume pakaian dinas sesuai kebutuhan

- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.5.000.000, dimana penyesuaian ini dilakukan untuk

kebutuhan medical check up Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Anggaran pada RKPD tahun 2025 sebesar Rp.5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

- d. Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.191.390.000,- yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Anggaran pada RKPD tahun 2025 sebesar Rp.400.000.000,- menjadi Rp.591.390.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025
9. Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah
- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 476.300.500,- dan APBD 2025 sebesar Rp.476.300.500,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.584.681.500,- atau bertambah sebesar Rp.108.381.000,- karena adanya kebutuhan untuk penambahan alat-alat dapur rumah tangga dan perlengkapan kamar serta ruangan tamu.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 321.242.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp.321.242.000,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.487.995.000,- atau bertambah sebesar Rp.166.753.000,- karena adanya penambahan kebutuhan untuk alat-alat dapur rumah tangga dan perlengkapan kamar serta ruangan tamu.
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Pada Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 94.895.200,- dan APBD 2025 sebesar Rp.94.895.200,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.155.270.700,- atau bertambah sebesar Rp.60.375.500,- karena adanya penambahan kebutuhan untuk belanja alat-alat dapur, laundry, perlengkapan kamar.

10. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 74.300.700,- dan APBD 2025 sebesar Rp.74.300.700,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.85.517.700,- atau bertambah sebesar Rp.11.217.000,- karena adanya penyesuaian anggaran.
 - b. Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 60.449.700,- dan menjadi Rp.190.449.700,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.180.071.700,- atau bertambah sebesar Rp.119.622.000,- karena adanya penambahan belanja konsultansi dengan pihak ketiga terkait Survei Kepuasan Masyarakat
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pada Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 39.102.750,- dan APBD 2025 sebesar Rp.39.102.750,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.39.102.450,- atau berkurang sebesar Rp.300,- karena adanya penyesuaian rekening belanja sesuai kebutuhan.
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 99.980.050,- dan APBD 2025 sebesar Rp.99.980.050,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.152.983.550,- atau bertambah sebesar Rp.53.003.500,- karena adanya penambahan untuk rapat koordinasi perangkat daerah dengan KDH/WKDH
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Pada Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 2.171.064.900,- dan APBD 2025 sebesar Rp.2.171.064.900,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.1.138.381.900,- atau berkurang sebesar Rp.1.032.683.000,- karena adanya pengurangan perjalanan dinas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Pada Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan ditambahkan anggaran sebesar Rp.36.872.000,- untuk kebutuhan dokumentasi tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dari RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.324.467.000,- menjadi Rp.361.339.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025.

II. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan

a. Penataan Administrasi Pemeritahan

Pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemeritahan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 232.352.000,- dan menjadi Rp.432.352.000,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.331.759.700,- atau bertambah sebesar Rp.99.407.700,- untuk penambahan untuk fasilitasi orientasi DPD LPM dan penyesuaian dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 63.888.750,- dan APBD 2025 sebesar Rp.63.888.750,- Pada Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp.52.717.800,- sehingga terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.11.170.950,- karena adanya pengurangan perjalanan dinas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 332.306.600,- dan menjadi Rp.407.766.550,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp.380.547.050,- sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp.48.240.450,- karena adanya penambahan belanja untuk esistensi LPPD

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 559.138.450,- dan menjadi Rp.700.158.450,- pada APBD 2025 karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.849.958.600,- sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp.290.820.150,- penambahan terjadi karena adanya kebutuhan belanja fasilitasi MTQ Nasional Tingkat Propinsi.

- b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 437.784.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp 532.935.000,- karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.526.172.500,- sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp.88.388.500,- karena adanya pengalokasian anggaran untuk TPHD Kota Payakumbuh dan penyesuaian rekening belanja honorarium.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp.113.766.000,- dan APBD 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 113.766.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.66.555.750,- atau berkurang sebesar Rp.47.210.250,- karena adanya pengurangan perjalanan dinas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 265.688.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp 435.931.750,- karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.428.451.750,- sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. sebesar Rp.162.763.750,- untuk biaya advokasi dan pendampingan masalah hukum Pemerintah Kota Payakumbuh.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri anggaran RKPD 2025 sebesar Rp.9.946.000,- dan APBD 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 9.946.000,-. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.14.631.000,- atau bertambah sebesar Rp.4.685.000,- karena adanya penambahan belanja makan dan minum rapat Kerjasama daerah

III. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 32.499.000,- dan APBD 2025 sebesar Rp.32.499.000,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.32.498.800,- atau berkurang sebesar Rp.200,- karena adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 64.533.150,- dan APBD 2025 sebesar Rp.64.533.150,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.64.532.950,- atau berkurang sebesar Rp.200,- karena adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 26.245.900,- dan APBD 2025 sebesar Rp.26.245.900,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.24.737.900,- atau berkurang sebesar Rp.1.508.000,- karena adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pada Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 150.888.000,-

dan APBD 2025 sebesar Rp.150.888.000,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.209.790.000,- atau bertambah sebesar Rp.58.902.000,- karena adanya penambahan belanja modal computer untuk ruang Bidding LPSE

- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 21.482.850,- dan APBD 2025 sebesar Rp.65.019.000,- karena adanya dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.39.534.000,- atau bertambah sebesar Rp.18.051.150,- karena adanya penambahan belanja sosialisasi pengadaan barang dan jasa.

3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air anggaran RKPD 2025 sebesar Rp 12.853.100,- dan APBD 2025 sebesar Rp.12.853.100,- Pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp.10.603.100,- atau berkurang sebesar Rp.2.250.000,- karena adanya pengurangan sesuai Inpres No. 1 tahun 2025.

Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian Kinerja dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.708.482.737,00	32.949.194.011,00	32.891.498.737,00	1.183.016.000,00							22.545.860.938,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							31.708.482.737,00	32.949.194.011,00	32.891.498.737,00	1.183.016.000,00							22.545.860.938,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM				88,60 A Indeks Kategori	88,60 Indeks	27.393.538.487,00	27.908.838.911,00	27.867.435.387,00	-7.974.677.339,00							19.418.861.148,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>IKM Sekretariat Daerah Persentase capaian kinerja program/ kegiatan</i>				100 % 89 nilai	100 % 89 nilai	99.394.050,00	99.394.050,00	125.759.700,00	26.365.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	16.812.300,00	16.812.300,00	16.812.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	82.581.750,00	82.581.750,00	108.947.400,00	26.365.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</i>				90 %	90 %	11.157.319.696,00	11.194.119.696,00	11.198.229.696,00	40.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	9.315.910.801,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10.607.197.096,00	10.643.997.096,00	10.431.507.096,00	-175.690.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		8.755.910.801,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	550.122.600,00	550.122.600,00	766.722.600,00	216.600.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i>				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	71.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	80 Paket	71.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	9.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar				100 %	100 %	2.797.540.200,00	2.974.443.500,00	2.822.484.000,00	24.943.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		1.185.814.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	34.985.000,00	34.985.000,00	66.015.000,00	31.030.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	99.996.000,00	99.996.000,00	99.996.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	69.743.000,00	69.743.000,00	77.254.000,00	7.511.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12 Paket	39.448.050,00	59.476.350,00	62.297.350,00	22.849.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.714.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	424.123.150,00	424.123.150,00	392.285.650,00	-31.837.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	889.697.000,00	889.697.000,00	1.426.416.000,00	536.719.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	144 Laporan	1.239.548.000,00	1.396.423.000,00	698.220.000,00	-541.328.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor				90 %	90 %	3.394.721.963,00	3.490.943.963,00	3.516.465.588,00	121.743.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		40.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.350.000.000,00	1.446.222.000,00	1.446.222.000,00	96.222.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	8 Unit	199.835.675,00	199.835.675,00	188.849.950,00	-10.985.725,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	44.898.000,00	44.898.000,00	89.898.000,00	45.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	99.998.388,00	99.998.388,00	99.998.388,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4 Unit	4 Unit	99.989.900,00	99.989.900,00	91.497.250,00	-8.492.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</i>				100 %	100 %	2.965.786.014,00	2.965.786.014,00	3.361.942.140,00	396.156.126,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	4 Laporan	941.039.294,00	941.039.294,00	913.908.334,00	-27.130.960,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	391.790.000,00	391.790.000,00	520.035.250,00	128.245.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.632.956.720,00	1.632.956.720,00	1.927.998.556,00	295.041.836,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>				90 %	90 %	1.739.949.100,00	1.749.721.600,00	1.936.547.192,00	196.598.092,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		1.379.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	15 Unit	612.180.000,00	612.180.000,00	601.400.000,00	-10.780.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			601.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	754.140.000,00	754.140.000,00	590.750.000,00	-163.390.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			397.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	45 Unit	9.977.500,00	9.750.000,00	27.500.000,00	17.522.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.210.000,00	22.210.000,00	29.660.000,00	17.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	233.721.600,00	233.721.600,00	535.317.192,00	301.595.592,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	7 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	92.720.000,00	92.720.000,00	126.920.000,00	34.200.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH				100 %	100 %	1.456.024.664,00	1.512.627.288,00	1.590.663.571,00	134.638.907,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		637.469.807,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	984.905.144,00	845.117.768,00	845.227.471,00	-139.677.673,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			182.469.807,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				5 Paket	6 Paket	66.119.520,00	66.119.520,00	144.046.100,00	77.926.580,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	8 Orang	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	591.390.000,00	591.390.000,00	191.390.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase pelayanan kerumahaan Sekretariat Daerah dengan baik</i>				100 %	100 %	892.437.700,00	892.437.700,00	1.227.947.200,00	335.509.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		673.517.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				15 Paket	15 Paket	476.300.500,00	476.300.500,00	584.681.500,00	108.381.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				15 Paket	15 Paket	321.242.000,00	321.242.000,00	487.995.000,00	166.753.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				15 Paket	15 Paket	94.895.200,00	94.895.200,00	155.270.700,00	60.375.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			73.517.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	<i>Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah</i>				39.09 %	39.09 %	173.853.150,00	303.853.150,00	304.691.850,00	130.838.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		486.498.470,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.300.700,00	74.300.700,00	85.517.700,00	11.217.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			166.537.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	60.449.700,00	190.449.700,00	180.071.700,00	119.622.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	39.102.750,00	39.102.750,00	39.102.450,00	-300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.960.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik				100 %	100 %	2.595.511.950,00	2.595.511.950,00	1.652.704.450,00	-942.807.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		2.380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	99.980.050,00	99.980.050,00	152.983.550,00	53.003.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	2.171.064.900,00	2.171.064.900,00	1.138.381.900,00	-1.032.683.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	324.467.000,00	324.467.000,00	361.339.000,00	36.872.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD indeks reformasi hukum				3.1900 74,00 Nilai Indeks	3.4000 87 Nilai Indeks	3.987.838.900,00	4.669.713.600,00	4.623.763.250,00	-1.510.839.080,00							2.476.999.820,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu				100 %	100 %	628.547.350,00	904.007.300,00	765.024.550,00	136.477.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	3 Dokumen	232.352.000,00	432.352.000,00	331.759.700,00	99.407.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.888.750,00	63.888.750,00	52.717.800,00	-11.170.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	332.306.600,00	407.766.550,00	380.547.050,00	48.240.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	2.958.960.150,00	3.195.131.150,00	3.338.168.800,00	379.208.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	3 Dokumen	559.138.450,00	700.158.450,00	849.958.600,00	290.820.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	1.962.037.700,00	1.962.037.700,00	1.962.037.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	2 Dokumen	437.784.000,00	532.935.000,00	526.172.500,00	88.388.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi				100 %	100 %	387.432.000,00	557.675.750,00	502.985.500,00	115.553.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		509.999.820,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	113.766.000,00	113.766.000,00	66.555.750,00	-47.210.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			99.999.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	265.688.000,00	435.931.750,00	428.451.750,00	162.763.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	3 Dokumen	7.978.000,00	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi				5 MoU/PKS	5 MoU/PKS	12.899.400,00	12.899.400,00	17.584.400,00	4.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		107.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	9.946.000,00	9.946.000,00	14.631.000,00	4.685.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	2.953.400,00	2.953.400,00	2.953.400,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa				77 Indeks	91,58 Indeks	327.105.350,00	370.641.500,00	400.300.100,00	322.894.620,00							649.999.970,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	97.032.150,00	97.032.150,00	97.031.750,00	-400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.499.000,00	32.499.000,00	32.498.800,00	-200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	1 Laporan	64.533.150,00	64.533.150,00	64.532.950,00	-200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti</i>				100 %	100 %	18.603.350,00	18.603.350,00	18.603.350,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				12 Laporan	12 Laporan	18.603.350,00	18.603.350,00	18.603.350,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik</i>				100 % 4 kali	100 % 4 kali	198.616.750,00	242.152.900,00	274.061.900,00	75.445.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	26.245.900,00	26.245.900,00	24.737.900,00	-1.508.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.888.000,00	150.888.000,00	209.790.000,00	58.902.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				40 Orang	40 Orang	21.482.850,00	65.019.000,00	39.534.000,00	18.051.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun</i>				1 dokumen	1 dokumen	12.853.100,00	12.853.100,00	10.603.100,00	-2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		9.999.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.853.100,00	12.853.100,00	10.603.100,00	-2.250.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.999.970,00	SEKRETARIAT DAERAH	
J U M L A H									31.708.482.737,00	32.949.194.011,00	32.891.498.737,00	1.183.016.000,00								22.545.860.938,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 ini merupakan revisi dari rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 serta peralihan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini sebagai bahan dalam penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja 6 (enam) bulan yang lalu.

Adanya perubahan rencana kerja ini diharapkan agar Kota Payakumbuh serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Payakumbuh, 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001